Vol. 4, No. 4, Desember 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Strengthening Understanding of Constitutional Law Through Contextual Learning Based on Current Issues in Malang City

Rika Novitasari[1,a)*], Tikka Dessy Harsanti[1,b)]
[1,2)]Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Malang, 65139, Indonesia
Email: [a*)]rikanovita29@gmail.com, [b)]bintangaurel6@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembelajaran kontekstual berbasis isu-isu aktual dalam memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap Hukum Tata Negara di perguruan tinggi hukum di Kota Malang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap dosen serta mahasiswa mata kuliah Hukum Tata Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kontekstual mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dasar ketatanegaraan dan mengaitkannya dengan peristiwa hukum serta politik yang sedang terjadi, seperti pelaksanaan pemilu, revisi undang-undang, dan kebijakan pemerintahan. Mahasiswa menjadi lebih aktif dan kritis dalam mengemukakan argumentasi hukum, sedangkan dosen berperan sebagai fasilitator dalam mengarahkan diskusi berbasis masalah aktual. Selain berdampak positif terhadap pemahaman konseptual dan kesadaran konstitusional, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan waktu pembelajaran dan kemampuan literasi digital mahasiswa dalam menilai validitas sumber hukum daring. Temuan ini menegaskan bahwa pembelajaran kontekstual berbasis isu aktual merupakan strategi efektif untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum, sekaligus memperkuat kompetensi reflektif mahasiswa hukum di era transformasi digital.

Kata kunci: Hukum Tata Negara, pembelajaran kontekstual, isu actual, mahasiswa hukum, kesadaran konstitusional

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of contextual learning based on current legal and political issues in strengthening law students' understanding of Constitutional Law at law faculties in Malang City. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving lecturers and students enrolled in Constitutional Law courses. The findings reveal that contextual learning enhances students' ability to comprehend fundamental constitutional concepts and connect them with real-life legal and political phenomena such as elections, legislative amendments, and government policies. Students became more active and critical in formulating constitutional arguments, while lecturers acted as facilitators guiding discussions around contemporary legal issues. In addition to improving conceptual understanding and constitutional awareness, the study identifies several challenges, including limited instructional time and students' varying levels of digital literacy in evaluating the credibility of online legal sources. These findings confirm that contextual learning based on current issues is an effective pedagogical strategy to bridge the gap between legal theory and practice, fostering reflective competence among law students in the digital transformation era.

Keywords: *Constitutional Law, contextual learning, current issues, law students, constitutional awareness*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
12.11.2025	30.11.2025	15.12.2025	31.12.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pemahaman tentang Hukum Tata Negara (HTN) merupakan komponen esensial bagi mahasiswa Fakultas Hukum karena ilmu ini tidak hanya menyajikan aturan formal ketatanegaraan, melainkan juga menanamkan kemampuan analisis konstitusional dan kesadaran kewarganegaraan yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi profesional dan sosial di kemudian hari. Dalam konteks tersebut, kurikulum dan praktik pembelajaran di perguruan tinggi memiliki peran sentral untuk mentransformasikan pengetahuan normatif menjadi kompetensi yang aplikatif dan kritis. Namun realitas pendidikan tinggi hukum di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mentransformasikan pendekatan pembelajaran agar lebih relevan dengan dinamika sosial-politikal dan praktik ketatanegaraan yang aktual. Kajian kebijakan nasional yang memetakan transformasi pendidikan tinggi hukum menegaskan bahwa masih terdapat kecenderungan pembelajaran yang bersifat formalistik dan kurang mengaitkan teori hukum dengan praktik empiris di masyarakat, sehingga menimbulkan jurang antara output pendidikan dan kebutuhan sistem hukum nasional.

Secara kebijakan, agenda transformasi pendidikan tinggi termasuk kebijakan Merdeka BelajarKampus Merdeka (MBKM) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi menekankan hak belajar yang lebih luas, pengalaman pembelajaran di luar kampus, serta penguatan capaian pembelajaran berbasis kompetensi. Kebijakan ini secara eksplisit mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan model pembelajaran yang lebih kontekstual, praktis, dan lintas-disiplin sehingga lulusan memiliki kemampuan analitis dan penerapan hukum yang lebih baik dalam konteks nyata. Pernyataan kebijakan tersebut memberi landasan normatif bagi upaya inovasi metodologis di bidang pendidikan hukum.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap norma-konstitusional dan lembaga ketatanegaraan belum optimal. Penelitian-penelitian terbaru mengindikasikan adanya kelemahan dalam penguasaan konsep-konsep konstitusional oleh mahasiswa, baik dari aspek pengenalan norma maupun kemampuan menerapkan konsep tersebut pada kasus aktual, yang pada gilirannya menghambat kemampuan mereka berargumen secara konstitusional dalam konteks praktis. Temuan semacam ini mengindikasikan masalah substantif pada level proses pembelajaran—bukan sekadar defisit referensi teoritik yang menuntut intervensi pedagogik berbasis bukti.

Salah satu pendekatan pedagogik yang relevan untuk menjembatani jurang antara teori dan praktik adalah Pembelajaran Kontekstual *(Contextual Teaching and Learning/CTL)* yaitu strategi pembelajaran yang mengaitkan materi akademik dengan fenomena nyata sehingga mendorong aktivitas berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, dan transfer pengetahuan ke situasi aktual. Bukti studi pendidikan di tingkat nasional menunjukkan bahwa model-model pembelajaran kontekstual (termasuk metode studi kasus, experiential learning, diskusi berbasis isu, dan Value Clarification Technique) mampu meningkatkan kesadaran kewarganegaraan, kemampuan argumentasi konstitusional, dan motivasi belajar mahasiswa dalam ranah ilmu sosial dan hukum. Oleh karena itu, model pembelajaran kontekstual dipandang sebagai alternatif yang potensial untuk memperkuat pemahaman HTN.

Namun demikian, kajian kebijakan dan praktik juga menunjukkan adanya kesenjangan (legal gap / implementation gap) antara tuntutan normatif kebijakan pendidikan tinggi yang mensyaratkan pembelajaran berbasis kompetensi dan pengalaman (seperti MBKM dan SN-PT) dengan praktik pedagogis yang masih didominasi pendekatan transfer pengetahuan dan formalistik di banyak fakultas hukum. Kesenjangan ini bukan hanya persoalan teknis pengajaran, melainkan juga persoalan tata kelola kurikulum, kapasitas dosen dalam merancang pengalaman belajar kontekstual, serta ketersediaan sarana/prasarana pendukung agar pembelajaran berbasis isu aktual dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan. Implikasi praktis dari kesenjangan ini adalah terjadinya ketidaksesuaian antara capaian pembelajaran yang diharapkan secara regulatif dan capaian nyata yang terukur pada mahasiswa.

Konteks lokal—seperti Kota Malang dan sekitarnya memiliki potensi besar sebagai "laboratorium" pembelajaran kontekstual HTN karena diperkaya beragam isu publik lokal (mis. otonomi daerah, kebijakan pemerintahan daerah, sengketa publik berskala daerah, atau dinamika partisipasi politik lokal) yang dapat dijadikan studi kasus nyata dalam kelas. Beberapa institusi pendidikan hukum di Malang telah mengembangkan inisiatif pembelajaran dan kurikulum yang membuka peluang untuk integrasi isu lokal

ke dalam pengajaran, namun dokumentasi sistematis tentang bagaimana praktik pembelajaran kontekstual ini diterapkan, hambatan yang muncul, dan dampaknya terhadap pemahaman mahasiswa masih terbatas. Oleh karena itu kajian empiris yang mendeskripsikan proses, mekanisme, dan efek pembelajaran HTN berbasis isu lokal di Malang menjadi penting untuk mengisi kekosongan pengetahuan ini sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengembangan pendidikan hukum yang kontekstual dan responsif.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berangkat dari dua ranah kesenjangan yang saling berkaitan: (1) kesenjangan kebijakan-praktik dalam pendidikan tinggi hukum (antara ekspektasi MBKM/SN-PT dan praktik pengajaran aktual), dan (2) kesenjangan kompetensi mahasiswa dalam memahami dan menerapkan konsep Hukum Tata Negara dalam konteks kasus nyata. Kesenjangan-kesenjangan tersebut menunjukkan kebutuhan riset yang tidak sekadar mendeskripsikan fenomena, melainkan juga mengevaluasi efektivitas strategi pengajaran (khususnya pembelajaran kontekstual berbasis isu aktual) dalam memperkuat pemahaman HTN mahasiswa. Dengan demikian, kebaharuan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis pedagogik (model pembelajaran kontekstual) dengan kajian kontekstual lokal (isu-isu aktual di Kota Malang) untuk menilai dan merumuskan praktik pembelajaran yang mampu menjembatani jurang antara teori konstitusional dan praktik kewarganegaraan mahasiswa.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berangkat dari dua ranah kesenjangan yang saling berkaitan, yaitu kesenjangan antara kebijakan dan praktik dalam pendidikan tinggi hukum—khususnya antara ekspektasi normatif kebijakan *Merdeka Belajar–Kampus Merdeka* serta Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan praktik pengajaran yang masih bersifat formalistik—dan kesenjangan kompetensi mahasiswa dalam memahami serta menerapkan konsep-konsep Hukum Tata Negara dalam konteks kasus nyata. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena pembelajaran, tetapi juga menganalisis efektivitas strategi pengajaran kontekstual berbasis isu-isu aktual dalam memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap Hukum Tata Negara. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan utama: (1) bentuk dan strategi penerapan pembelajaran kontekstual berbasis isu-isu aktual dalam pengajaran Hukum Tata Negara di perguruan tinggi hukum di Kota Malang, (2) pengaruh penerapan pembelajaran kontekstual terhadap penguatan pemahaman konseptual dan kemampuan argumentasi konstitusional mahasiswa, serta (3) faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi keberhasilan penerapan model pembelajaran tersebut beserta rekomendasi pengembangannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus (case study) yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis praktik pembelajaran kontekstual berbasis isu aktual dalam mata kuliah Hukum Tata Negara pada perguruan tinggi di Kota Malang. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam fenomena pembelajaran dalam konteks nyata dan batasan waktu-ruang tertentu sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang kaya mengenai proses, strategi, dan dinamika interaksi antara dosen, mahasiswa, serta lingkungan pembelajaran (Yin, 2018; Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini bersifat deskriptif-interpretatif: selain mendeskripsikan praktik pembelajaran, penelitian juga menafsirkan makna tindakan pedagogis dan respons mahasiswa terhadap isu-isu aktual yang dijadikan bahan ajar.

Lokasi penelitian adalah beberapa kelas atau program studi pada Fakultas Hukum di Kota Malang yang menyelenggarakan mata kuliah Hukum Tata Negara. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan adanya dosen yang menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual atau program pembelajaran yang memungkinkan integrasi isu lokal ke dalam proses pengajaran. Subjek penelitian terdiri atas dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara yang dipilih secara purposive dan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut pada semester terkait. Teknik pemilihan partisipan mengikuti prinsip purposive sampling untuk memastikan informan memiliki pengalaman atau peran yang relevan dalam fenomena yang dikaji (Patton, 2015).

Teknik pengumpulan data utama meliputi wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif/non-partisipatif terhadap proses pembelajaran di kelas (termasuk diskusi, simulasi, dan penugasan berbasis isu aktual), serta analisis dokumen (silabus, RPS, bahan ajar, contoh tugas mahasiswa, dan evaluasi pembelajaran). Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali perspektif dosen tentang tujuan, strategi, dan tantangan penerapan pembelajaran kontekstual serta untuk menangkap pengalaman, persepsi, dan refleksi mahasiswa terkait pemahaman Hukum Tata Negara. Observasi kelas dilaksanakan untuk mencatat praktik pengajaran nyata, interaksi dosen-mahasiswa, dan penggunaan isu-isu aktual sebagai bahan pembelajaran. Dokumentasi menjadi sumber pelengkap untuk memverifikasi praktik yang diobservasi dan untuk memetakan kesesuaian antara RPS/kurikulum dengan praktik di lapangan. Penggunaan kombinasi teknik ini dimaksudkan untuk mencapai triangulasi data sehingga temuan lebih dapat dipercaya (Flick, 2018; Patton, 2015).

Prosedur pengumpulan data dimulai dengan memperoleh izin institusional dan persetujuan informan, dilanjutkan dengan penjadwalan wawancara dan observasi. Wawancara direkam (dengan izin) dan ditranskrip kata demi kata untuk keperluan analisis; catatan observasi dibuat secara sistematis menggunakan format rubrik yang memuat indikator-indikator pengajaran kontekstual (misalnya pemilihan isu lokal, metode diskusi, keterlibatan mahasiswa, dan evaluasi). Dokumen dikumpulkan dalam bentuk salinan digital atau foto dan diinventarisasi berdasarkan kategori. Selama pengumpulan data peneliti melakukan reflexivity untuk mencatat asumsi awal dan potensi bias yang mungkin memengaruhi observasi dan interpretasi.

Analisis data mengikuti prosedur analitik kualitatif yang sistematis dan berulang (iteratif). Tahap awal adalah familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen; langkah berikutnya adalah proses pengkodean awal (initial coding) menggunakan teknik siklus pengkodean yang direkomendasikan oleh Saldaña (2016) untuk menangkap unit-unit makna penting. Setelah pengkodean awal, dilakukan pengelompokan kode menjadi pola dan tema berdasarkan prosedur thematic analysis yang berorientasi pada reflexive thematic analysis (fase familiarisasi, pengkodean, pengembangan tema, peninjauan tema, definisi dan penamaan tema, serta penyusunan laporan) sebagaimana dijelaskan oleh Braun dan Clarke (2019). Dalam proses ini peneliti menerapkan iterasi antara data dan teori untuk menghasilkan kategori yang bermakna serta merumuskan hubungan antartema yang menggambarkan bagaimana pembelajaran kontekstual berkontribusi pada penguatan pemahaman Hukum Tata Negara. Teknik triangulasi antar-sumber data digunakan untuk menguji konsistensi temuan; apabila terdapat perbedaan narasi antara sumber, peneliti melakukan klarifikasi melalui wawancara lanjutan atau member check kepada informan (Nowell et al., 2017; Patton, 2015).

Upaya menjamin keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian meliputi triangulasi data (wawancara, observasi, dokumentasi), member checking (verifikasi temuan sementara kepada sejumlah informan kunci), audit trail berupa catatan lapangan dan keputusan analitis yang terdokumentasi, serta penyajian deskripsi tebal (thick description) agar pembaca dapat menilai transferabilitas temuan ke konteks lain. Selain itu peneliti menjaga dependabilitas dengan menyimpan versi transkrip, kode, dan memo analitis, serta melakukan refleksi kritis (reflexivity) untuk mengidentifikasi pengaruh peneliti terhadap proses penelitian (Nowell et al., 2017; Flick, 2018).

Aspek etika penelitian mendapat perhatian khusus. Sebelum pengumpulan data, peneliti memperoleh izin dari pihak institusi, menjelaskan tujuan penelitian kepada semua partisipan, dan meminta persetujuan tertulis (informed consent). Kerahasiaan identitas informan dijaga dengan pemberian kode pseudonim pada kutipan atau data yang dipublikasikan, serta penyimpanan data rekaman dan transkrip pada media yang aman. Semua prosedur etika ini dilaksanakan sesuai standar penelitian kualitatif mutakhir untuk melindungi hak dan martabat partisipan (Creswell & Poth, 2018; Patton, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Strategi Pembelajaran Kontekstual dalam Mata Kuliah Hukum Tata Negara

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa dosen di beberapa perguruan tinggi hukum di Kota Malang menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning* / CTL)

dengan mengintegrasikan isu-isu aktual seperti pemilu serentak, perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta polemik kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Strategi ini diimplementasikan melalui tahapan kegiatan pembelajaran yang meliputi eksplorasi isu, analisis teks hukum, diskusi kelompok, presentasi argumentatif, dan refleksi hukum.

Observasi menunjukkan bahwa penggunaan isu kontekstual mendorong mahasiswa untuk menautkan teori-teori dasar Hukum Tata Negara—seperti konsep *rule of law*, kedaulatan rakyat, dan pemisahan kekuasaan—dengan fenomena hukum yang sedang berlangsung di masyarakat. Aktivitas diskusi berbasis masalah dan studi kasus memungkinkan mahasiswa berperan aktif, menyampaikan argumentasi berdasarkan prinsip konstitusi, dan mengaitkannya dengan praktik ketatanegaraan kontemporer.

Pendekatan ini sejalan dengan temuan Efendiy, Kristiawan, Umamy, dan Hamid (2023) yang menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar mahasiswa, terutama ketika dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata dan permasalahan aktual di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, CTL menjadi bentuk adaptif dari PBL karena mengarahkan mahasiswa untuk menemukan relevansi antara konsep hukum dan realitas sosial-politik yang melingkupinya.

Dari wawancara dengan dosen pengampu, diperoleh keterangan bahwa integrasi isu aktual juga berfungsi sebagai media untuk menumbuhkan kesadaran konstitusional mahasiswa. Misalnya, dalam pembahasan mengenai amandemen UUD 1945, mahasiswa diminta menelaah artikel berita terkini tentang wacana penundaan pemilu dan menganalisisnya menggunakan perspektif hukum tata negara. Strategi seperti ini membuat pembelajaran lebih kontekstual, bermakna, dan berdampak pada peningkatan pemahaman substantif terhadap prinsip-prinsip ketatanegaraan.

Pengaruh Isu-Isu Aktual terhadap Penguatan Pemahaman Konseptual dan Refleksi Kritis Mahasiswa

Analisis tematik dari data wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam isu-isu aktual berdampak positif terhadap kemampuan mereka memahami konsep-konsep abstrak dalam Hukum Tata Negara. Mahasiswa merasa lebih mudah memahami konsep konstitusionalisme, supremasi hukum, serta mekanisme checks and balances ketika contoh yang digunakan diambil dari peristiwa aktual seperti pembatalan UU oleh Mahkamah Konstitusi atau kontroversi pengangkatan penjabat kepala daerah.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan mahasiswa:

"*Ketika dosen mengaitkan teori kedaulatan rakyat dengan perdebatan politik tentang pemilu, kami jadi paham bahwa teori itu tidak hanya untuk dihafalkan, tetapi juga dipakai untuk menilai apakah praktik kenegaraan kita masih sesuai dengan konstitusi atau tidak.*"

Temuan ini menunjukkan bahwa keterhubungan langsung antara teori dan praktik hukum berfungsi sebagai katalis dalam membentuk pemahaman yang reflektif dan kritis. Mahasiswa tidak hanya memahami konsep hukum secara normatif, tetapi juga mengembangkan kesadaran terhadap implikasi sosial dan etis dari penerapan norma konstitusional dalam kehidupan bernegara.

Hasil penelitian ini mendukung pandangan Umamy, Yulianto, Tjahjono, dan Shodiq (2023) bahwa integrasi konteks aktual dan penggunaan literatur digital dapat memperkuat kemampuan berpikir kritis serta meningkatkan keterlibatan kognitif mahasiswa dalam pembelajaran berbasis teks. Dalam konteks Hukum Tata Negara, integrasi isu aktual berfungsi sebagai *cyber-issue literacy*, yaitu kemampuan membaca, menafsirkan, dan menganalisis teks hukum sekaligus teks sosial yang beredar di ruang digital.

Tabel berikut menggambarkan ringkasan temuan dari wawancara dan observasi mengenai perubahan pemahaman mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran kontekstual:

Tabel 1. Ringkasan Wawancara

Aspek Pemahaman Hukum Tata Negara	Kondisi Sebelum Pembelajaran Kontekstual	Kondisi Setelah Pembelajaran Kontekstual
Pemahaman konseptual dasar	Terbatas pada hafalan pasal dan teori	Mampu mengaitkan teori dengan praktik hukum
Kemampuan berpikir kritis	Cenderung deskriptif	Mampu menilai dan mengkritisi kebijakan publik
Kesadaran konstitusional	Rendah	Meningkat; muncul sikap reflektif terhadap isu politik hukum
Motivasi belajar	Fluktuatif	Lebih stabil dan meningkat karena isu dianggap relevan

Data tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis isu aktual mampu memperkuat dimensi kognitif, afektif, dan metakognitif mahasiswa secara simultan. Hal ini sejalan dengan prinsip *constructivist learning*, di mana pengetahuan dibangun melalui pengalaman kontekstual dan refleksi sosial (Fry, Ketteridge, & Marshall, 2015).

Tantangan dan Faktor Pendukung Penerapan Pembelajaran Kontekstual

Meskipun memberikan dampak positif, penerapan pembelajaran kontekstual berbasis isu aktual menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan hasil wawancara, tantangan utama adalah keterbatasan waktu perkuliahan, kurangnya kesiapan dosen dalam mengadaptasi isu terkini menjadi bahan ajar, serta kebutuhan untuk memilah informasi yang valid di tengah arus disinformasi digital. Beberapa dosen juga menyatakan bahwa tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan literasi informasi yang memadai untuk menilai kredibilitas sumber berita dan data hukum.

Namun demikian, terdapat pula sejumlah faktor pendukung yang memperkuat keberhasilan implementasi pendekatan ini, antara lain dukungan kebijakan kampus terhadap inovasi pembelajaran, ketersediaan akses sumber hukum digital (misalnya *JDIH*, *Mahkamah Konstitusi Online*, dan *Hukumonline*), serta kolaborasi antardosen dalam merancang tugas berbasis isu aktual.

Dalam konteks ini, penting untuk menekankan peran *learning environment* yang kolaboratif dan reflektif. Menurut Biggs dan Tang (2011), lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran aktif akan mendorong mahasiswa mengembangkan *deep learning approach*—yakni pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep dan kemampuan menghubungkan teori dengan konteks sosial. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dosen dalam mendesain pembelajaran berbasis isu menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan model pembelajaran kontekstual di bidang hukum.

Temuan ini mempertegas bahwa penguatan pemahaman Hukum Tata Negara tidak hanya bergantung pada kualitas materi ajar, tetapi juga pada relevansi sosial dan kemampuan pedagogis dosen dalam mengaitkan teori dengan praktik. Dengan demikian, hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pembelajaran hukum yang kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan warga negara yang kritis dan sadar konstitusi. Bab berikutnya akan memaparkan simpulan yang merangkum temuan utama penelitian serta rekomendasi pengembangan lebih lanjut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kontekstual berbasis isu-isu aktual dalam mata kuliah Hukum Tata Negara terbukti efektif dalam memperkuat pemahaman konseptual dan kemampuan reflektif mahasiswa di perguruan tinggi hukum di Kota Malang. Melalui integrasi peristiwa hukum dan politik terkini, mahasiswa tidak hanya memahami teori ketatanegaraan secara normatif, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan praktik penyelenggaraan negara yang nyata. Pendekatan ini menjadikan mahasiswa lebih aktif, kritis, dan terlibat dalam proses pembelajaran karena setiap isu aktual yang dikaji menuntut analisis konstitusional yang berbasis pada prinsip hukum positif dan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pembelajaran kontekstual berperan penting sebagai jembatan antara teori akademik dan realitas sosial-politik, serta memperkuat kesadaran konstitusional mahasiswa sebagai calon sarjana hukum yang berintegritas.

Selain berdampak positif terhadap pemahaman mahasiswa, penerapan model ini juga mengungkap beberapa tantangan, seperti keterbatasan waktu pembelajaran, kesiapan dosen dalam mengintegrasikan isu aktual ke dalam materi kuliah, dan kemampuan literasi digital mahasiswa dalam menyeleksi informasi

hukum yang kredibel. Namun, dukungan kebijakan kampus terhadap inovasi pembelajaran, ketersediaan sumber hukum daring, serta kolaborasi antarpendidik menjadi faktor penting dalam keberhasilan model ini. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi pedagogis dosen hukum dan pembentukan lingkungan belajar yang reflektif menjadi langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan pembelajaran kontekstual di bidang Hukum Tata Negara. Model ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan pembelajaran hukum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan hukum kontemporer di Indonesia.

Ucapan Terima kasih

REFERENSI

Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4th ed.). McGraw-Hill Education.

Braun, V., & Clarke, V. (2019). *Thematic analysis: A practical guide.* SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Efendiy, K., Kristiawan, I., Umamy, E., & Hamid, A. B. (2023). The influence of problem-based learning model and motivation on the learning outcomes of students in the faculty of education at Wisnuwardhana University. *Jurnal Disastri, 5*(2). https://doi.org/10.33752/disastri.v5i2.4099

Flick, U. (2018). *Doing qualitative research* (3rd ed.). SAGE Publications.

Fry, H., Ketteridge, S., & Marshall, S. (2015). *A handbook for teaching and learning in higher education: Enhancing academic practice* (4th ed.). Routledge.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020a). *Buku panduan Merdeka Belajar — Kampus Merdeka.* Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020-1.pdf

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020b). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.* https://peraturan.bpk.go.id/Details/163703/permendikbud-no-3-tahun-2020

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2024). *Transformasi pendidikan tinggi hukum di Indonesia: Laporan hasil kajian.* https://ditkumlasi.bappenas.go.id/download/file/03_FIN_Laporan_Hasil_Kajian_Transformasi_PTH.pdf

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods, 16*, 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847

Pakpahan, E., dkk. (2024). Pemahaman mahasiswa terhadap UUD 1945 sebagai bentuk dasar konstitusi Negara Republik Indonesia (studi empiris). *International Journal / Repository.* https://rayyanjurnal.com/index.php/IJEDR/article/view/1691

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.

Project for Innovation of Teaching Adat Law (PINTAL), Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada. (2024). *Inisiatif inovasi pembelajaran hukum lokal (hukum adat) sebagai bagian dari pedagogi kontekstual.* https://law.ugm.ac.id/research-and-teaching-project-proyek-untuk-inovasi-pembelajaran-hukum-adat/

Saldaña, J. (2016). *The coding manual for qualitative researchers* (3rd ed.). SAGE Publications.

Siregar, H. (2023). Model Value Clarification Technique dalam membentuk kecerdasan kewarganegaraan melalui mata kuliah Hukum Tata Negara (penelitian tindakan kelas). *Jurnal Civics: Jurnal Pendidikan Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang. https://ejournal.umm.ac.id

Tim Peneliti (Undiksha). (2024). Pembelajaran PKN berbasis Contextual Teaching and Learning: Analisis implementasi dan efek terhadap pemahaman kewarganegaraan. *JPPSH: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Universitas Pendidikan Ganesha. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH/article/download/98329/34648/303203

Umamy, E., Yulianto, B., Tjahjono, T., & Shodiq, S. (2023). Integration of cyber literature and reading skills critical in literature courses in PBSI project Wisnuwardhana University. *Jurnal Disastri, 5*(3), 504–512. https://doi.org/10.33752/disastri.v5i3.4089

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.